

MASALAH-MASALAH DAN PERSPEKTIF KEBIJAKSANAAN KOMUNIKASI

Rufinus LAHUR

PENGANTAR

PBB sudah mencanangkan bahwa tahun 1983 adalah Tahun Komunikasi Dunia (World Communications Year), hal mana sekaligus menunjukkan bahwa memang kita sekarang ini berada dalam Era Komunikasi. Era Komunikasi ini bukanlah datang tanpa diundang. Ia hadir dilahirkan oleh perkembangan sains dan teknologi terutama teknologi telekomunikasi. Terdamparnya televisi di desa-desa di Indonesia barulah sekedar percikan dari gelombang teknologi komunikasi lainnya yang bakal menghempaskan kita semua. Dengan adanya penemuan silicon chip yang memungkinkan komputer mini dapat digunakan untuk pelbagai kebutuhan kantor dan rumah tangga, maka media dan sistem informasi ini pada dirinya membawa transformasi yang dramatis, pada kehidupan manusia, yang tidak mustahil sebentar lagi akan kita alami.

Apa dampak dari gelombang teknologi komunikasi ini bagi martabat manusia Indonesia terutama yang hidup di pedesaan, tidak ada yang dapat mengetahuinya dengan pasti. Mungkin inilah salah satu sumber kecemasan orang menghadapi pengaruh teknologi telekomunikasi, yaitu ketidaktahuan mengenai pengaruh manipulatif yang bakal diciptakannya yang dapat bersegi banyak dan belum tentu sesuai dengan kepentingan negara bangsa yang bersangkutan. Perbedaan menyolok antara tingkat perkembangan negara maju yang sudah pada tingkat padat otak (brain intensif) dan negara berkembang yang masih pada taraf padat karya, mengakibatkan yang terakhir ini tetap saja sebagai pasaran negara maju, bukan saja pasaran dari komoditi biasa, akan tetapi juga pasaran dari komoditi sosial, hasil industri intelektual negara maju, yaitu informasi. Hubungan yang tidak seimbang inilah merupakan ciri abad ke-20 ini, baik pada bidang ekonomi, sains dan teknologi termasuk teknologi telekomunikasi, beserta pesan yang dibawanya yaitu informasi; membanjirnya unsur kebudayaan asing, merupakan masalah aktual masyarakat,

pendeknya ia telah menjadi problema sosial yang turut menambah kecemasan negara berkembang menyongsong Era Komunikasi sekarang ini.

Akan tetapi bersamaan dengan kecemasan itu, kita juga tidak dapat mengingkari bahwa akibat perkembangan sains dan teknologi maka dunia semakin jadi kecil dan saling berhubungan, sehingga mustahil kita dapat menutup diri atau menghindarkan diri dari pengaruh sistem yang lebih luas. Sehingga masalahnya bagi kita bagaimana memampukan diri sehingga dapat menggunakan keajaiban teknologi komunikasi demi kepentingan pembangunan manusia Indonesia.

Kalau masyarakat bangsa sebagai suatu unit fungsional kita mau analogikan dengan suatu organisme, maka komunikasi dapat dianalogikan dengan sistem jaringan syarafnya sedangkan kebudayaan bangsa dapat dianalogikan sebagai jiwa dari organisme bangsa itu. Dalam pengandaian ini tersirat dianutnya suatu sistem terbuka, termasuk sub-sistem komunikasinya, di mana sistem komunikasi mempunyai misi untuk turut merealisasi tujuan nasional sesuai dengan kebutuhan tingkat perkembangan dan pengembangan identitas bangsa.

Sejauh mana suatu bangsa sanggup mengembangkan kemampuan untuk menghadapi ketimpangan komunikasi dunia sekaligus mengembangkan identitasnya dengan menata suatu sistem komunikasi yang tepat merupakan ujian bagi semua negara berkembang termasuk Indonesia.

Dengan latar belakang ini berturut-turut akan dikemukakan beberapa masalah komunikasi, modal atau sumber dalam menghadapi masalah komunikasi, keadaan komunikasi, kebijaksanaan komunikasi dan penutup.

MASALAH KOMUNIKASI

Komunikasi walaupun ia diprioritaskan, hanya merupakan salah satu bagian saja dari sekian prioritas kebutuhan, yang secara serempak muncul untuk segera dipenuhi. Karena itu masalahnya bukanlah soal penting atau tidak pentingnya komunikasi, akan tetapi bagaimana ia dilaksanakan dalam hubungan imbang dengan lain-lain kebutuhan secara keseluruhan dan terutama disesuaikan dengan kemampuan nyata yang disediakan untuk itu.

Kalau negara maju telah mengalami secara bertahap perkembangan media komunikasi mulai dari tahap pertama (yang tidak membutuhkan listrik dan mesin dalam pemakaiannya) seperti tulisan, gambar, peta; kemudian disusul dengan tahap berikut dari media di mana mesin sudah dipakai seperti mesin

cetak; disusul dengan media berikutnya yang memakai listrik dan mesin dalam proses komunikasinya seperti film, radio dan televisi, serta pada generasi yang keempat di mana digunakannya komputer dengan proses komunikasi yang tergantung pada komunikasi antara "manusia dan mesin." Lain halnya dengan negara yang sedang berkembang, keempat tahap generasi media ini secara serempak melandanya. Padahal mereka belum sempat mengidentifikasi peranan dari media ini masing-masing apalagi pemanfaatan dan penguasaannya, tidak saja perangkat kerasnya (*hardware*), akan tetapi juga perangkat lunaknya (*software*). Keadaan ini pada gilirannya menimbulkan masalah sosial yang mungkin tidak terdapat atau tidak dikenal di negara asalnya, tetapi pasti menimbulkan masalah bagi negara konsumen seperti halnya Indonesia. Bagaimana menyiapkan tenaga ahli dan trampil dalam waktu yang singkat apalagi untuk menyiapkan masyarakat secara keseluruhan, bukanlah suatu kegiatan yang tanpa masalah.

Keaneka-an masyarakat bangsa sub-nasional sangat beragam, baik ditinjau dari latar belakang kebudayaan, tingkat perkembangan, perbedaan kadar sikap keterbukaannya, letak geografis dan sebagainya. Hal ini menuntut peranan tambahan dari komunikasi, yaitu di samping berperanan mendorong integrasi bangsa sebagaimana layaknya untuk suatu sistem negara kesatuan yang menganut ideologi tertentu yaitu Pancasila, juga komunikasi yang ada harus berorientasi pada masyarakat sub-nasional yang harus tumbuh. Pendeknya diperlukan suatu pola komunikasi Bhinneka Tunggal Ika, tidak saja substansinya mungkin juga media dan caranya, yang dapat menjangkau penduduk yang tersebar dalam 931 pulau-pulau besar dan kecil.

Dari kedua masalah yang baru tersebut di atas timbullah satu anak masalah sebagai akibatnya yaitu bahwa informasi yang ada melalui komunikasi massa yang ada seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan yang memang diperlukan oleh masyarakat. Atau dengan kata lain tidak ada relevansinya. Malah sebaliknya mungkin saja hanya menimbulkan keinginan dan hasrat konsumsi mewah tanpa didukung oleh kemampuan nyata. Keadaan semacam ini hanya akan menimbulkan frustrasi yang tidak perlu. Di samping itu rendahnya kemampuan intelektual dari masyarakat, terutama di desa, mengakibatkan isi pesan yang terkandung dalam media massa modern (radio, televisi, film dan media cetak), sangat sulit diserap.

Daftar masalah yang berhubungan dengan komunikasi ini dapat diperpanjang, akan tetapi untuk maksud ini apa yang dikemukakan di atas dianggap sudah cukup memadai. Dari masalah komunikasi ini tampak beberapa seginya yang menonjol, yaitu adanya ketimpangan komunikasi, baik tingkat global, maupun tingkat nasional; serta ketimpangan antara perangkat keras yang relatif lengkap dan perangkat lunak yang belum siap. Masalahnya bukan

saja bagaimana meratakan pemindahan pengetahuan dan informasi umumnya akan tetapi menonjol adanya kebutuhan akan suatu sistem global yang sehat, berikut pendinamisan sistem sosial nasional yang sehat pula sehingga dapat terwujud kaitan yang fungsional pada tingkat nasional, regional maupun global. Tantangan inilah yang secara serentak dihadapkan pada setiap negara berkembang sekarang ini, termasuk Indonesia.

MODAL DALAM MENGHADAPI MASALAH KOMUNIKASI

Sebagai suatu unit fungsional, maka modal utama bangsa Indonesia dalam menghadapi masalah yang berhubungan dengan komunikasi dapat dilihat dalam pengalaman hidup pada masa silam, kemampuan untuk melihat masalah yang dihadapi hari ini, berikut kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia untuk menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan kemampuan nyata yang ada.

Dari sejarah bangsa Indonesia tampak jelas bagaimana besarnya kemampuan dari bangsa yang mendiami Nusantara ini untuk mengadakan akulturasi, baik pada jaman Hindu, kedatangan Islam, maupun kedatangan dunia maju dengan pengetahuan dan teknologinya. Kedatangan pengaruh luar itu, termasuk pengaruh penjajahan ternyata ditanggapi oleh manusia di kawasan ini dengan tidak mengorbankan identitas nasionalnya. Malah sebaliknya semua pengaruhnya itu dijawab dengan suatu tekad solidaritas yang tinggi seperti antara lain ditunjukkan oleh sejarah perjuangan melawan penjajahan termasuk diwujudkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang menyatakan jiwa persatuan dan kesatuan yang tinggi, yaitu satu bangsa, bangsa Indonesia, satu tanah air tanah air Indonesia dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Adanya kesatuan tekad, semangat dan jiwa ini dengan bahasa yang satu pula merupakan modal utama untuk menghadapi segala tantangan, termasuk masalah yang dibawa oleh membanjirnya komunikasi di wilayah ini. Dalam menghadapi tantangan ini, maka para pejuang kebangsaan dan pemuka-pemuka masyarakat memanfaatkan pelbagai media tradisional, komunikasi interpersonal, di samping media massa lainnya yang ada dalam masyarakat.

Di samping melihat kekuatan yang berakar dalam sejarah, maka secara sadar dan berencana telah dikembangkan dan dilembagakan sikap dan kebijaksanaan *untuk melihat ke depan*, terutama berorientasi kepada manusia sebagai subyek pembangunan, di mana juga tampak peranan komunikasi di dalamnya. Kemampuan politik ini sudah lama melembaga melalui rangkaian Ketetapan MPR dalam menentukan GBHN, serta pelaksanaannya dituangkan dalam Repelita dan pelaksanaan operasionalnya setiap tahun melalui APBN. Dengan demikian, secara perlahan dan pasti manusia Indonesia dididik untuk turut mengantisipasi budaya masa depan, yang manusiawi.

Jalur-jalur komunikasi yang ada semakin menunjukkan kemajuan. Sejalan dengan adanya rangkaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terus berlanjut, maka demikian juga halnya dengan keadaan komunikasi menunjukkan kemajuan yang dapat dianggap sebagai modal untuk usaha selanjutnya. Dalam hubungan ini dapat disebut beberapa jalur yang ada hubungannya dengan kegiatan komunikasi, yaitu jalur komunikasi melalui administrasi negara/pemerintah, jalur komunikasi massa, jalur komunikasi tradisional, kontak interpersonal dan jalur pendidikan terutama pendidikan tinggi. Pada umumnya terdapat kemajuan orientasi dan mutunya tidak saja segi perangkat keras (hardware) akan tetapi juga perangkat lunak (software). Pada pihak lain lembaga-lembaga kemasyarakatan juga mulai berfungsi termasuk organisasi politik dan organisasi profesi, dan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat umumnya. Lembaga-lembaga ini pun menurut definisi melakukan fungsi komunikasi. Jalur-jalur ini pada dirinya merupakan "agen" komunikasi, yang melakukan proses komunikasi sambil memanfaatkan media massa modern, media tradisional maupun kontak personal. Masalah utama ialah sejauh mana media itu dikombinasi secara tepat sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat setempat.

Dengan sumber ini sebagai modal, maka bangsa Indonesia terus-menerus berusaha untuk mendinamisasikan sistem kemasyarakatannya dengan penuh optimisme. Dengan latar belakang semangat ini pula maka di bawah ini akan dikemukakan beberapa kenyataan pada bidang komunikasi, kemudian disusul dengan kebijaksanaan yang perlu diterapkan dalam peletakan dasar sistem komunikasi, sebagai bagian daripada sistem nasional keseluruhan, demi meningkatkan ketahanan nasional secara keseluruhan pada pelbagai bidang, baik ideologis, politik, ekonomi, hankam maupun sosial budaya.

KEADAAN KOMUNIKASI

Di atas telah dikemukakan secara umum modal bangsa Indonesia dalam menghadapi dan menjalankan eksistensi hidupnya, khususnya yang berhubungan dengan masalah komunikasi yang sedang dihadapi. Berikut ini akan dikemukakan beberapa hal yang ada hubungannya dengan keadaan nyata dari komunikasi walaupun hanya secara umum saja.

Dalam tahun yang terakhir ini, sejalan dengan pelaksanaan tahun ketiga Repelita III, maka kegiatan komunikasi diarahkan untuk menciptakan iklim yang dapat menumbuhkan pengertian yang tepat di kalangan masyarakat akan tujuan pembangunan nasional pada umumnya berikut program pembangunan serta secara kontinyu mengkomunikasikan pelaksanaannya, baik yang berhasil maupun yang belum berhasil dengan menunjukkan berba-

gai sebab dan musababnya serta kemungkinan penanggulangannya pada masa yang akan datang. Hal ini dilakukan melalui pelbagai media sehingga meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dan perasaan memiliki serta bertanggung jawab dalam ikut mengusahakan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk itu telah dilakukan kegiatan penerangan oleh pemerintah; baik secara langsung dengan mengadakan pameran (di seluruh tingkat mulai propinsi, kabupaten dan kecamatan di seluruh tanah air), kegiatan tatap muka, pemanfaatan media massa seperti radio, televisi, film, pers dan penerbitan-penerbitan, yang mutunya terus ditingkatkan dengan dukungan pelbagai penelitian dan lokakarya; kegiatan-kegiatan juga dilakukan oleh perguruan tinggi dan organisasi profesi terutama yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan komunikasi.

Demi meningkatkan daya guna dan tepat guna penerangan, maka kegiatan penerangan dilakukan secara terpadu melalui Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) dan Badan Koordinasi Penerangan (Bakopen) seperti Bakopen Bimas, Haji, Keluarga Berencana serta melalui penyelenggaraan pameran yang dilakukan secara periodik di seluruh daerah propinsi, kabupaten dan kecamatan. Sebagai unit pelaksana kegiatan operasi penerangan telah dibentuk Pusat Penerangan Masyarakat (Puspenmas) pada kabupaten dan kotamadya di seluruh propinsi. Diharapkan Puspenmas dapat menampung dan menyalurkan informasi ke atas sebagai arus balik yang diperoleh dari masyarakat dan mendorong komunikasi antara kelompok masyarakat.

Di samping itu, unit yang demikian ini merupakan badan yang bertanggung jawab dalam membina kelompok siaran pedesaan, kelompok penonton televisi dan usaha koran masuk desa. Karenanya badan ini diperlengkapi dengan macam-macam alat yang diperlukan seperti proyektor, slide, pengeras suara, radio, mesin cetak kecil serta satuan penerangan keliling untuk meningkatkan daya dan jangkauan penerangan ke daerah pedesaan.

Dalam rangka menciptakan pemerataan penerangan bagi seluruh golongan masyarakat serta memungkinkan rakyat yang belum mampu untuk dapat menikmati siaran televisi, maka sampai tahun 1981/1982 telah disebarkan sebanyak 21.543 pesawat televisi umum dengan atau tanpa generator di kecamatan-kecamatan di seluruh tanah air yang terjangkau oleh siaran televisi, termasuk Propinsi Timor Timur. Selain itu sejumlah 11.937 radio umum telah ditempatkan di kecamatan-kecamatan yang belum terjangkau oleh siaran televisi sekaligus untuk menunjang diskusi-diskusi kelompok siaran pedesaan.

Khusus di bidang radio maka dibandingkan dengan keadaan beberapa tahun lalu tampak perkembangan, jika jumlah stasiun penyiaran yang tahun 1973/1974 sebanyak 46, kini berjumlah 49; stasiun pemancar dalam tahun 1973/1974 sebanyak 120, kini (1981/1982) banyaknya 278, dengan kekuatan

seluruhnya 2.851 KW, suatu peningkatan sekitar 235% jika dibandingkan dengan keadaan kekuatan pemancar tahun 1973/1974 yang hanya 850 KW.

Di samping usaha meningkatkan ketrampilan yang berhubungan dengan penguasaan segi perangkat keras (hardware) maka terus ditingkatkan usaha yang berhubungan dengan mutu programnya yaitu software-nya; walaupun yang terakhir ini belum memenuhi kebutuhan dari seluruh golongan masyarakat. Untuk meningkatkan mutu siaran maka telah dilakukan secara teratur peningkatan ketrampilan personalia melalui Pusat Latihan RRI, begitu pula telah diselenggarakan penataran para petugas siaran pedesaan maupun ketua kelompoknya.

Bersamaan dengan itu maka dalam rangka pembinaan radio siaran non-RRI telah diadakan penataran bagi para penanggung jawab teknik dan penanggung jawab siaran dengan harapan agar radio siaran swasta dapat meningkatkan mutu siarannya guna menunjang pembangunan nasional.

Di samping itu siaran pendidikan/sekolah yang diselenggarakan sebagai percobaan oleh RRI pada beberapa tempat (Jakarta, Yogyakarta dan Semarang) sejak tahun 1969, saat ini telah dapat dipersiapkan oleh stasiun-stasiun RRI di seluruh Indonesia, terutama untuk keperluan penataran guru-guru sekolah dasar.

Siaran RRI yang ditujukan ke luar negeri telah diperluas dengan penyelenggaraan siaran dalam bahasa Thai dan Jepang di samping siaran-siaran yang dilakukan dalam bahasa Indonesia, Inggris, Perancis, Arab, Mandarin dan Melayu. Pada saat ini jumlah jam siaran yang ditujukan ke luar negeri adalah 11 jam setiap hari.

Pada bidang televisi telah dilaksanakan pembangunan pemancar-pemancar baru; dengan memanfaatkan fasilitas sistem komunikasi satelit domestik (SKSD) maka siaran TVRI Jakarta saat ini telah dapat diterima di seluruh ibukota propinsi, termasuk ibukota dari propinsi yang ke-27 yaitu Dilli di Timor Timur.

Pada saat ini (1982) di seluruh Indonesia terdapat 9 stasiun penyiaran, pada tahun 1973/1974 ada 6 buah. Kini jumlah stasiun pemancar ada 120 buah, sedangkan pada tahun 1973/1974 terdapat 22 buah. Stasiun penghubung sekarang ada 30 buah, sedangkan pada tahun 1973/1974 ada 6 buah. Luas daerah jangkauan siaran telah bergerak dari 72.100 km² dalam tahun 1973/1974 menjadi 427.500 km² saat ini. Di pihak lain jumlah penduduk yang dalam daerah pancaran saat ini 90 juta, suatu kenaikan lebih 100% jika dibandingkan dengan keadaan lima tahun sebelumnya. Jumlah pesawat televisi

yang dipakai penduduk pun mengalami kenaikan sehingga sekarang ini (tahun 1982) terdapat 2.599.827 buah televisi.

Perubahan pola acaran siaran TVRI yang lebih berorientasi pada pembangunan pedesaan dan tata budaya nasional telah dimulai sejak 20 Mei 1975 dan akan terus ditingkatkan serta diperluas pula bagi siaran radio dan produksi film.

Dengan makin meluasnya jangkauan siaran TVRI dan adanya distribusi pesawat televisi umum sampai tingkat kecamatan, maka isi dan penyajian acara siaran TVRI disesuaikan dengan aneka ragam tata nilai kehidupan masyarakat di daerah-daerah. Penyiaran film asing dikurangi secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan TVRI untuk membuat produksi acaranya sendiri.

Pada bidang produksi film penerangan pemerintah, telah diadakan peningkatan sarana Unit Pusat Produksi Film Negara (PPFN) di antaranya dengan pengadaan sebuah unit laboratorium film berwarna yang saat ini telah dioperasikan. Pengadaan berbagai peralatan produksi film yang baru telah didukung dengan pelaksanaan rehabilitasi prasarana dan peningkatan ketrampilan karyawannya. Laboratorium film tersebut selain beroperasi untuk film penerangan juga memberikan fasilitas bagi pengembangan produksi film swasta nasional.

Pembinaan dan pengembangan pers didasarkan pada pola pers yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu adanya keseimbangan antara kebebasan menyatakan pendapat dan kesadaran serta tanggung jawab untuk turut menentapkan stabilitas nasional. Mengenai bantuan pemerintah dalam pembinaan pers ini lebih dititikberatkan kepada peningkatan mutu pers, sarana, usaha dan produksi. Pembinaan yang telah dilakukan adalah dalam bidang peningkatan pengetahuan pers dan tata laksana, keuangan, permodalan, periklanan dan sirkulasi. Pembinaan kewartawanan ditujukan kepada peningkatan ketrampilan jurnalistik wartawan Indonesia, di samping memampukan rasa tanggung jawab pers nasional sebagai lembaga dari masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kegiatan dilakukan dalam bentuk Karya Latihan dan Lokakarya. Pembinaan materi bagi pengembangan pers dilakukan melalui pemberian fasilitas berupa keringanan bea masuk bagi kertas koran untuk pers dan bahan baku/penunjang yang digunakan industri grafika pers serta biaya angkutan kertas koran untuk pers daerah. Dengan demikian terus diusahakan agar perusahaan pers nasional tahap demi tahap mampu untuk berkembang, sehingga hasilnya terjangkau oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia.

Dengan terbentuknya Badan Kerja Sama Periklanan, maka mulai tahun 1977 dirintis usaha menyetatkan isi periklanan dan meratakan iklan dalam surat-surat kabar sampai ke daerah-daerah.

Pengembangan industri grafika pers mendapat perhatian di dalam penyusunan daftar skala prioritas PMDN. Selanjutnya dalam rangka mengembangkan dan memperluas pasaran pembaca surat kabar di daerah-daerah pedesaan dan untuk menumbuhkan kegemaran membaca, telah diselenggarakan Koran Masuk Desa yang dimulai di empat propinsi di Jawa dan Sulawesi Selatan, dan pada tahun 1981/1982 mencakup 22 propinsi, dengan jumlah oplah 15.652.000 eksemplar per tahun.

Keadaan komunikasi ini mungkin belum seberapa jika ditinjau misalnya dengan ukuran yang pernah dibuat oleh UNESCO; dan dengan ukuran itu Indonesia merupakan salah satu dari dua pertiga negara yang belum memenuhinya. Akan tetapi jika dilihat dari tumpukan masalah yang dihadapi, maka apa yang diutarakan adalah *pencerminan dari kemampuan nyata*, dan yang lebih penting lagi cerminan dari tekad untuk merealisasi cita-cita nasional di mana manusia Indonesia dengan nilai budayanya ditempatkan pada posisi sentral.

Karenanya, masalah utama bagi Indonesia, ialah bagaimana *meratakan kemampuan minimal* setiap warga negara, kelompok budaya, agar mampu berdialog dengan media dan sistem informasi yang ada; yaitu kemampuan untuk dapat membaca media cetak, kemampuan untuk mendengar radio, kemampuan untuk menonton televisi dan film. Pendeknya, persiapan untuk berbudaya komunikasi massa. Adanya gejala sekedar nongkrong menghabiskan waktu nonton televisi/radio, sehingga mengganggu pekerjaan sehari-hari merupakan peringatan, bagaimana pentingnya *disiplin* keluarga dan masyarakat dalam hidup bersama dengan media komunikasi ini. Sedangkan rendahnya pengetahuan umum, mengakibatkan minimnya daya serap terhadap pesan komunikasi yang ada. Semua ini, merupakan sumber inspirasi untuk membina proses komunikasi selanjutnya, baik nasional maupun lokal.

KEBIJAKSANAAN KOMUNIKASI

Kebijaksanaan yang berhubungan dengan komunikasi pada dasarnya sudah termuat secara eksplisit dalam UUD 1945, GBHN yang ditetapkan oleh MPR dan lain-lain peraturan perundangan. Di samping ada yang eksplisit juga ada yang secara tersirat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Baik peraturan perundangan maupun konteks sosio-kultural, pada dasarnya merupakan faktor yang mencerminkan sifat kegiatan komunikasi sekaligus juga merupakan faktor yang membatasinya.

Dengan memperhatikan keadaan dan beberapa masalah pokok yang berhubungan dengan komunikasi seperti yang telah dikemukakan maka dapat diajukan kebijaksanaan komunikasi umumnya dan penerangan khususnya sebagai berikut. Yang pertama, meratakan kemampuan dan peluang bagi semua WNI, terutama yang berdiam di desa, untuk dapat menjangkau dan mengambil manfaat dari sumber informasi yang mereka perlukan; salah satu caranya ialah memperbesar arus penerangan ke daerah pedesaan dalam rangka pemerataan informasi dan pengembangan sikapnya yang selaras dengan tuntutan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan sekarang ini bermaksud meniadakan ketimpangan sosial termasuk meniadakan ketimpangan komunikasi/informasi antara masyarakat kota dan masyarakat desa di mana sebagian terbesar dari rakyat Indonesia berada di pedesaan. Kecuali itu pertimbangan lain yang juga penting ialah bahwa titik sentral dari Repelita adalah bidang pertanian dan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat banyak yang sebagian terbesar hidup dan bertempat tinggal di daerah pedesaan. Untuk meningkatkan kecerdasan dan pengertiannya mengenai masalah yang kita hadapi berikut kemungkinan yang dapat dilakukan melalui perencanaan dan kerja keras di mana mereka harus ikut ambil bagian di dalamnya maka arus penerangan/komunikasi ke daerah pedesaan harus ditingkatkan. Sehingga dengan demikian pembangunan yang ada secara sadar dan berencana dimulai dari bawah dan dari dalam. Untuk itu kebijaksanaan penerangan diarahkan untuk pemerataan informasi sampai ke desa-desa melalui sarana yang ada seperti penerangan tatap muka, penerangan radio, televisi, film, pers dan penerbitan. Kedua, pengembangan dan peningkatan kegiatan penerangan dan komunikasi timbal-balik.

Gairah untuk berpartisipasi dari rakyat dalam pembangunan perlu ditingkatkan, karena dengan jalan inilah mereka secara konkrit ikut bertanggung jawab serta ikut memikirkan dan memecahkan masalah-masalah pembangunan yang dihadapinya. Karenanya apa yang menjadi kebutuhan mereka, pengalaman dan tanggapannya terhadap pelbagai pelaksanaan pembangunan perlu didengar. Tidak saja sebagai umpan balik untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin ada akan tetapi di mana perlu mungkin juga kebijaksanaan yang ada perlu ditinjau; begitu pula umpan balik dari masyarakat pada gilirannya dapat memperbaiki mutu informasi/komunikasi, tidak saja isinya mungkin juga caranya. Tetapi *yang lebih penting lagi bahwa usaha untuk mempengaruhi sikap mereka sehingga semakin dewasa dalam menanggapi masalahnya, mungkin dapat lebih efektif melalui kontak pribadi*. Karenanya komunikasi dua arah ini tidak saja berlangsung antara pemerintah dan masyarakat, akan tetapi terutama juga diharapkan *berlangsung secara berlanjut antara kelompok masyarakat, secara bebas, terbuka, terarah, jujur, bertanggung jawab dan adanya rasa saling percaya, saling menghormati dan saling membutuhkan*. Di mana pesan disampaikan *secara persuasif*, tak ubahnya seperti jual-

beli barang dagangan di pasar bebas. *Hanya dengan hubungan dialog semacam ini, komunikasi menemukan maknanya yang hakiki.*

Dalam hubungan dengan dialog ini maka unsur masyarakat yang dibawa dapat berperanan seperti pemimpin tradisional, para guru dan lain-lain warga desa yang telah berpendidikan, yang mungkin dalam praktek sudah menjadi tempat bertanya dari warga masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya kerja sama antara pendekatan komunikasi massa dan kontak langsung ini, maka dapat diharapkan isi pesan bisa lebih efektif dan efisien.

Dasar idiiil dari komunikasi dua arah ini ialah bahwa dalam pembangunan yang dilakukan ini manusia ditempatkan bukan saja sebagai obyek akan tetapi juga sebagai subyek. Sedangkan komunikasi sebagai bagian dari pembangunan itu dengan sendirinya harus menempatkan manusia itu sebagai subyek, sebab komunikasi itu untuk kepentingan mereka. Karenanya kebutuhan, tingkat perkembangan, dan tanggapan mereka harus menjadi konsiderasi utama dari setiap kegiatan komunikasi, sehingga senantiasa ada kemajuan, baik isi, teknik, media, maupun metode yang dipakai, yang terus-menerus dilakukan sebagai bagian dari kehidupan kita. Ketiga, kegiatan komunikasi dengan pendekatan kebudayaan.

Telah dikatakan bahwa kebudayaan merupakan jiwa dari organisme masyarakat bangsa, sedangkan komunikasi adalah merupakan sistem syarafnya. Karenanya ada hubungan yang sangat erat antara komunikasi dan kebudayaan. Komunikasi yang sehat dan menjangkau ke seluruh tubuh bangsa pada gilirannya turut mempersehat tubuh bangsa keseluruhan. Sebaliknya kalau komunikasi macet maka sebagian dari tubuh bangsa dapat lumpuh yang pada gilirannya mempengaruhi kehidupan jiwa dari bangsa itu. Inti dari tata nilai budaya bangsa secara eksplisit telah dituangkan dalam rumusan Pancasila yang telah menjadi pandangan hidup bangsa dan ideologi. Karena itu nilai budaya bangsa tersebut, tidak saja dipakai untuk pendekatan komunikasi akan tetapi sekaligus menjadi pegangan dan orientasinya, baik nasional maupun lokal. Kita menyadari bahwa manifestasi dari nilai budaya bangsa kita itu sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain, karenanya komunikasi hendaknya juga menitikberatkan pada penggunaan pendekatan kebudayaan yang beraneka itu. Baik untuk tingkat nasional dengan mengembangkan suatu kebijaksanaan "intercultural", dan dalam suatu unit yang lebih homogen dengan pendekatan kebudayaan setempat, terutama memanfaatkan pelbagai media tradisional yang tersebar di seluruh tanah air, seperti: Seudati di Aceh, Mamanda di Kalimantan, Ketoprak dan Wayang di Jawa, Randai di Sumatera Barat, dan lain-lain. Dengan melihat kenyataan bahwa di seluruh tanah air sekarang ini telah terdapat 64.650 desa yang tersebar dalam 931 pulau, lengkap dengan perbedaan cara hidup dan kebiasaan masing-masing, maka dapat di-

bayangkan bagaimana semakin terasa diperlukan suatu "kebijaksanaan komunikasi yang komprehensif" berikut pengelolaan yang tepat baik yang bersifat "sentral" maupun yang seharusnya di-"desentralisasi"-kan, baik yang "intercultural" maupun yang "inter-island". Karenanya, di samping media komunikasi yang mempunyai jangkauan dari Sabang hingga Merauke, diperlukan adanya *media komunikasi lokal*, misalnya komunikasi bagi kabupaten tertentu. Keempat, adanya kebijaksanaan komunikasi yang terpadu.

Dengan mengingat tujuan dari komunikasi, sasaran yang harus digarap yaitu terutama masyarakat pedesaan, dengan aneka adat-istiadat yang harus diperhitungkan yang tersebar dalam lingkungan wilayah yang begitu luas, maka perlu dikembangkan suatu kurikulum komunikasi yang memadai menurut media dan sarannya serta memanfaatkan semua lembaga yang ada, seperti lembaga pemerintah/negara, media komunikasi massa modern umumnya, lembaga tradisional dalam masyarakat, lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi serta lembaga masyarakat umumnya baik organisasi sosial politik maupun lembaga profesi. Dalam hubungan ini diperlukan suatu usaha interdisipliner, cross-cultural dan multiprofesional khususnya dalam menciptakan kurikulum komunikasi yang tepat, yang tidak saja mentransfer pengetahuan (knowledge) dan informasi pada umumnya akan tetapi juga dapat mendorong perubahan sikap yang diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan. Kurikulum komunikasi massa yang kita maksudkan ini perlu ditopang oleh kurikulum pendidikan juga pendidikan tinggi yang tepat sehingga kita semakin berkemampuan untuk mengarahkan dan memutuskan jenis pengetahuan yang tepat diperlukan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kecerdasannya berikut lingkungan sosial budayanya. Dalam hubungan ini perlu diselidiki arti konotatif dan denotatif dari semua simbol komunikasi sehingga mempunyai pengaruh yang diinginkan.

Segi lain dari pendekatan kurikuler komunikasi massa yang disebut di atas ialah memungkinkan masyarakat untuk menyeleksi dan menyaring mana pengetahuan (informasi) yang benar maupun yang tidak benar; berikut kemampuan untuk menanggapiya baik yang positif maupun terhadap informasi yang negatif, termasuk kemampuan untuk mengantisipasi akibat samping ("side effect") dan "after effect" dari semua informasi, sehingga selalu dapat dimanfaatkan untuk kebutuhannya sebagai manusia yang sedang membangun. Kemampuan tersebut di atas ini pada dasarnya merupakan kemampuan untuk mengadakan "self-transformation" terhadap setiap rangsangan apa pun sehingga bermanfaat bagi pendewasaan masyarakat yang bersangkutan. Di sini diperlukan pandangan yang menyeluruh terhadap lingkungan dan diri sendiri sebagai bangsa, sehingga dengan demikian kebijaksanaan komunikasi tidak hanya memperhitungkan "cost effectiveness" dalam perencanaannya akan tetapi juga "value effectiveness."

Karenanya sangat diperlukan adanya kebijaksanaan yang menyeluruh pada pelbagai bidang di mana komunikasi merupakan bagiannya. Untuk ini diperlukan paling tidak strategi pembangunan dan strategi kebudayaan. Untuk Indonesia, baik kebijaksanaan pembangunan maupun kebudayaan menempatkan manusia pada posisi sentral. Karenanya kebijaksanaan komunikasi pun demikian juga. Bangsa Indonesia juga dihadapkan dengan masalah ketimpangan komunikasi antara daerah dan golongan masyarakat. Juga di dalamnya terlibat usaha untuk memanusiakan manusia. Di sinilah menonjolnya segi moral daripada kebijaksanaan komunikasi. Dengan berorientasi kepada manusia dan mulai dari manusia bangsa Indonesia dapat terus berusaha untuk mendinamisasikan sistem masyarakat yang sehat sehingga dapat secara fungsional berkembang menumbuhkan kemampuan dan memenuhi kebutuhannya juga; dengan demikian masyarakat secara menyeluruh turut bertanggung jawab membina dan menyongsong suatu budaya masa depan yang sanggup menjawab masalah manusia dan kelangsungan serta peningkatan martabatnya.

PENUTUP

Kami menyadari, seperti telah juga disampaikan pada awal dari tulisan ini bahwa akibat perkembangan sains dan teknologi sekarang ini dunia semakin menjadi kecil dan menyatu. Demikian menjadi satunya sehingga keadaan saling bergantung tidak bisa dihindari lagi. Begitu pula dalam bidang komunikasi/informasi. Dalam keadaan saling bergantung ini sebagai salah satu dari negara yang sedang berkembang kami mengamati bahwa dalam bidang ini pun, seperti halnya dalam bidang sosial ekonomi terdapat saling bergantung yang tidak seimbang, yang tidak adil dan karenanya juga tidak sehat. Di mana monopoli informasi dan pengetahuan ada pada genggaman tangan negara yang sudah maju. Sedangkan sejarah juga telah menunjukkan termasuk sejarah penjajahan terhadap negara yang sedang berkembang diawali oleh penguasaan pada bidang pengetahuan termasuk teknologi. Sehingga tidak bisa dihindari lagi kesan bahwa pengetahuan adalah analog dengan kekuasaan. Siapa yang memiliki pengetahuan (termasuk sumber informasi) ia memiliki kekuasaan; sedangkan siapa yang mentransfer pengetahuan ia pada gilirannya berkuasa untuk mentransfer kekuasaan atau kehendaknya. Dan kedua-duanya ada pada tangan negara yang telah maju. Di sinilah aspek tidak etis dari komunikasi dunia dewasa ini bahwa segelintir manusia negara maju menguasai kehidupan atau memanipulasi manusia negara yang sedang berkembang.

Dalam menata kebijaksanaan komunikasi, maka negara berkembang seperti halnya Indonesia harus memperhitungkan faktor global komunikasi

yang strukturnya tidak adil itu, serta keadaan komunikasi dalam negeri yang belum fungsional termasuk ketimpangan komunikasi. Jadi kebijaksanaan komunikasi negara yang sedang berkembang bersegi dua; pada satu pihak memperjuangkan kondisi saling bergantung yang seimbang dengan negara maju, sedangkan pada pihak yang lain, yaitu ke dalam, meningkatkan kemampuan warganya untuk dapat memanfaatkan dan mengatasi keadaan komunikasi yang ada untuk pendewasaan dirinya, agar tidak menjadi korban dari perkembangan yang ada. Atau dengan kata lain meningkatkan kemampuan untuk mengadakan "self transformation" baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Untuk itu diperlukan pemerataan kemampuan dan kesanggupan untuk tetap belajar demi menciptakan dan menyongsong suatu budaya komunikasi yang lebih etis, di mana manusia menjadi sentralnya. Untuk itu perlu terus dikembangkan kemampuan untuk memanfaatkan dan menguasai tidak saja perangkat lunak dari komunikasi yang ada akan tetapi juga perangkat kerasnya. Sehingga lambat-laun negara berkembang tidak sekedar menjadi pasaran atau konsumen negara maju (knowledge-haves-countries) akan tetapi dapat mengembangkan diri juga sebagai produsen dengan mengembangkan pusat informasi, paling tidak menjadi pusat informasi tentang diri kita sendiri, sebagai bangsa.

Dalam kerangka inilah perlu dikembangkan kerja sama antara bangsa-bangsa baik secara bilateral maupun multilateral; baik regional seperti ASEAN maupun global. Sehingga benar-benar dirasakan oleh semua pihak adanya suatu sistem komunikasi global yang sehat, dengan bertumpu pada sistem komunikasi regional dan nasional yang sehat pula. Hanya dengan hubungan saling tergantung yang seimbang ini dapat dikembangkan budaya manusia yang lebih manusiawi. Atau dengan kata lain "segi moral" atau katakan "dimensi moral" dari strategi komunikasi global, regional dan nasional perlu ditonjolkan, agar manusia abad ke-20 ini tidak sekedar menjadi budak daripada kemajuan intelektualnya, tetapi dapat menjadi raja karena martabat kemanusiaannya mendapat tempat utama dalam perkembangan sejarahnya sendiri.

Sumber:

Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1982, Pelaksanaan Tahun Ketiga Repelita III (1 April 1981 s/d 31 Maret 1982), Bab XXI dan Bab XIV.